

ABSTRAK

Prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yang harus diterapkan diterapkan PT Angkasa Pura Solusi selaku anak perusahaan BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PER-01/MBU/2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara yaitu terdiri atas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*independency*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Secara teoritis praktik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *holding* BUMN dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut agar dapat bermanfaat bagi pendapatan negara berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan yang kompetitif kepada konsumen.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT Angkasa Pura Solusi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah menjadi perhatian serius oleh SPI. SPI sudah menyarankan untuk mengadakan pemusatan kewenangan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan/ *Procurement* saja, selain untuk memudahkan pendataan pengadaan barang dan jasa, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Sedangkan untuk tahapan seleksi penentuan perusahaan pemenang pengadaan barang dan jasa, ketika harga barang yang direncanakan dalam pengadaan barang dan jasanya harus melalui proses lelang ternyata kebutuhan atas barang atau jasa tersebut dibutuhkan segera, namun prosesnya ternyata tidak bisa dipercepat dan tetap harus sesuai dengan yang diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa, padahal perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut sebenarnya bisa ditunjuk melalui SP3 (Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan) saja.

Tujuan utama dari penelitian tesis ini adalah untuk menambah pemahaman tentang aspek-aspek hukum dari permasalahan yang telah

dirumuskan dengan cara mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dasar Hukum pengadaan barang dan jasa pada BUMN didasari oleh Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Direksi PT Angkasa Pura Solusi telah menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 013B/APS/SK/DIR/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barag/Jasa PT Angkasa Pura Solusi. Pada peraturan ini diatur mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi. Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pada PT Angkasa Pura Solusi harus mengacu pada peraturan ini.

Kata Kunci : GCG, Pengadaan Barang/Jasa, BUMN

ABSTRACT

The principles in Good Corporate Governance (GCG) that must be applied by PT Angkasa Pura Solusi as a subsidiary of BUMN in its activities as referred to in Article 3 PER-01 / MBU / 2011 issued by the State Minister for BUMN concerning the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) In state-owned enterprises, which consists of transparency, accountability, independence, responsibility and fairness. Theoretically, the practice of the principles of Good Corporate Governance in BUMN holding can increase the value (valuation) of the company by increasing the performance and value of the company so that it can benefit state revenues in the form of dividends, taxes, employment, and competitive products and services to consumers.

The obstacles experienced by PT Angkasa Pura Solusi in the implementation of the procurement of goods and services have actually become a serious concern by SPI. SPI has suggested to centralize the authority for the procurement of goods and services in the Procurement Section only, in addition to facilitating data collection on the procurement of goods and services, also to prevent irregularities in the procurement of goods and services at PT Angkasa Pura Solusi. Whereas for the selection stage of determining the winning company for the procurement of goods and services, when the price of the goods planned for the procurement of goods and services must go through the auction process it turns out that the need for the goods or services is needed immediately, but the process cannot be accelerated and must still be in accordance with what is regulated in guidelines for the procurement of goods and services, even though the companies providing these goods and services can actually be appointed through an SP3 (Letter of Determination of Implementing Work) only.

The main objective of this thesis research is to increase understanding of the legal aspects of the problems that have been formulated by collecting, systematizing and analyzing data relevant to the problem under study. The

research method used in this research is normative law, which is research that examines the study of documents, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and it can be in the form of opinions of scholars.

The legal basis for the procurement of goods and services in BUMN is based on the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-05 / MBU / 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. This specificity is enforced because BUMN is a form of business entity which all or most of its capital is owned by the state through direct participation originating from separated state assets. With the enactment of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-05 / MBU / 2008, the Board of Directors of PT Angkasa Pura Solusi has established Guidelines for the Procurement of Goods and Services based on the Decree of the Board of Directors Number: 013B / APS / SK / DIR / III / 2018, dated March 26, 2018 regarding Barag Procurement Guidelines / Services PT Angkasa Pura Solusi. This regulation regulates the mechanism for the procurement of goods and services at PT Angkasa Pura Solusi. In every process of procuring goods and services at PT Angkasa Pura Solusi, it must refer to this regulation.

Key words : GCG, procurement of goods and services, BUMN